

Belajar Dari Model India & Cina Sebagai Alternatif Solusi Kemiskinan Dunia

Raissa Ardianti

*Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRACT

Thomas Pogge and Amartya Sen claimed that the Adam Smith and Malthus's measurements of poverty and famine are problematic. The poverty diagnosis described by classical development theorists' neglect the possibility of the consumption capabilities and the diverse urgencies of public consumptions. In India and China in the late 1960s, poverty was not caused by the relationship between population and food supply but by the inequality of rights and capabilities of the societies. India adopted the "bottom up" solution which implemented directly to the root of the problems in their society. China also came up with different solutions. Eventhough there were no determined measurement of the level of success of these solutions, we still can see how the definition of poverty and famine has grown as claimed by Thomas Pogge and Amartya Sen.

Keywords: *Thomas Pogge, Amartya Sen, Poverty, famine, India, China*

Thomas Pogge dan Amartya Sen mengklaim bahwa solusi dan metode pengukuran kemiskinan ala Adam Smith dan Malthus bermasalah. Diagnosis kemiskinan yang dijelaskan oleh para ahli teori pembangunan klasik melupakan adanya kemungkinan kapabilitas dan kebutuhan konsumsi masyarakat yang beraneka ragam. Dalam kasus yang terjadi di India dan Cina tahun 1960an, kemiskinan tidak diakibatkan oleh hubungan antara populasi dan suplai bahan pangan tetapi oleh faktor ketimpangan hak dan kapabilitas masyarakat. India mengadopsi solusi dengan pendekatan "bottom up" yang diimplementasikan langsung pada akar masalah dalam masyarakat. Cina juga muncul dengan solusi berbeda. Meskipun belum ditetapkan ukuran mengenai tingkat keberhasilan solusi tersebut, kita dapat melihat bahwa definisi kemiskinan dan kelaparan telah berkembang sebagaimana yang dirumuskan oleh Thomas Pogge dan Amartya Sen.

Kata-kata kunci: *Thomas Pogge, Amartya Sen, Kemiskinan, Kelaparan, India, China*

Kemiskinan dan kelaparan adalah epidemi yang seringkali menjadi sorotan utama dalam pembangunan. Kemiskinan seringkali diklaim para teoritis pembangunan sebagai penghambat utama pertumbuhan ekonomi sehingga membutuhkan solusi tepat guna. Menariknya, definisi dan ukuran tentang kemiskinan ternyata tidak saja mampu diterjemahkan oleh para teoritis pembangunan klasik. Pada umumnya indikator kemiskinan dan kelaparan mengadopsi rumusan yang di-ciptakan oleh Adam Smith dan Malthus. Definisi konseptual Adam Smith mengenai kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat memiliki hal-hal yang dapat mendukung kebutuhan hidupnya (Smith dalam Shillington, Lasota, & Shantz 2009). Malthus mendefinisikan kondisi kelaparan sebagai timpangnya jumlah populasi manusia dengan ketersediaan bahan pangan. Malthus bahkan memiliki kurva sendiri untuk menjelaskan tentang “ramalan” bencana kelaparan yang akan melanda umat manusia.

Berlatarbelakang definisi tentang kemiskinan dan kelaparan seperti yang dirumuskan oleh Adam Smith dan Malthus, World Bank mengeksekusi indikator kemiskinan dan kelaparan berdasarkan kecenderungan masyarakat miskin yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap naiknya harga pangan. Terhitung sejak tahun 1980, World Bank melakukan monitor epidemi kelaparan di seluruh dunia khususnya pada wilayah Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur (World Bank Group 2013). Pada tahun 1980 World Bank bersama dengan forum International Finance Corporations (IFC) mengadakan perhitungan peningkatan populasi kemiskinan dan kelaparan melalui sistem *head counts*. Perhitungan sistem *head counts* dilakukan dengan jalan menghitung jumlah individu yang memiliki penghasilan di bawah standar layak (World Bank Group 2013). Berdasarkan sistem perhitungan *head counts* World Bank memberikan kebijakan agrikultur untuk solusi kelaparan jangka menengah. Kebijakan tersebut meliputi akses likuiditas agribisnis dan perlindungan perdagangan agrikultur untuk memperluas jaringan pasar di Asia Selatan dan Afrika.

Tulisan ini dibuat untuk menunjukkan bahwa solusi penanganan kemiskinan patut dipertimbangkan dari berbagai macam perspektif. Indikator kemiskinan bisa jadi berubah dari dekade satu ke dekade lainnya. Institusi ekonomi global seperti World Bank atau IMF sebagai agen umum pengentasan kemiskinan, cenderung menggunakan metode pengukuran kemiskinan melalui perhitungan ketimpangan jumlah pendapatan dengan kebutuhan hidup layak seorang individu. Hasil dari metode perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi pengentasan kemiskinan. Satu hal

yang menarik dari definisi kemiskinan dan kelaparan oleh institusi ekonomi global adalah kecenderungannya untuk menggeneralisir penyebab dan definisi kemiskinan, serta menghitung kemiskinan dalam bentuk angka melalui ukuran yang disamaratakan. Jika demikian dapatkah solusi yang “diresepkan” oleh teoris pembangunan klasik diterapkan di seluruh negara miskin?

Pembangunan Klasik Versus Pembangunan Berbasis HAM

Thomas Pogge menyadari bahwa setiap masyarakat di masing-masing negara memiliki kapabilitas yang berbeda dan tidak mungkin digeneralisasi. Atas dasar ilustrasi kesenjangan akses tersebut, Pogge memberikan rekomendasi pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menekankan pada tiga elemen (Pogge 1992). Elemen pertama adalah individualisme. Subyek pembangunan seharusnya ditujukan kepada individu yang berarti dibandingkan keluarga, suku, ras, komunitas keagamaan, bangsa atau bahkan negara. Kedua, universalitas yang artinya status seorang individu sebagai sebuah unit seharusnya tidak dipengaruhi perannya sebagai seorang pria, aristokrat, bangsa Arya, atau ras kulit putih. Ketiga, adanya status khusus yang memiliki pengaruh secara global, misalnya pengaruh seorang individu untuk memengaruhi golongannya.

Thomas Pogge (1992) mengklaim tiga aspek utama yang seringkali tidak dibidik oleh teoris pembangunan klasik. Pertama, di dalam suatu kondisi masyarakat tertentu terjadi kemungkinan kesenjangan kesempatan untuk berkontribusi terhadap keputusan politik yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kedua, akibat ketidakadilan sosial beberapa kalangan masyarakat yang memiliki bakat dan motivasi tinggi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang baik. Ketiga, seringkali tren perekonomian global justru membuahakan disparitas keuntungan bagi masyarakat-masyarakat marjinal. Ketiga aspek tersebut mendasari tesis Pogge tentang kebutuhan nilai-nilai kosmopolitan di dalam pembangunan. Pengertian miskin dan lapar selama ini diarahkan pada ketidaktersediaan sumber daya. Ketidaktersediaan sumber daya menjadi ukuran yang digeneralisasi terjadi di setiap kalangan masyarakat. Fakta yang terjadi di negara-negara berkembang, masalah yang terjadi pada dasarnya bukan diakibatkan oleh ketidaktersediaan sumber daya melainkan terbatasnya akses kalangan masyarakat tertentu terhadap sumber daya tersebut. Akses terhadap fasilitas yang sama seharusnya tidak dibatasi oleh kelas, ras, bangsa, atau kelas sosial (Pogge 1992).

Nilai kosmopolitanisme penting dalam mewujudkan kebebasan politik di bawah dunia yang berisi manusia-manusia yang memiliki kesetaraan hak dan kewajiban (Pogge 1994). Negara yang ideal seharusnya dihuni oleh orang-orang yang bebas menentukan kapabilitas dan aksesnya terhadap sumber daya. Selama ini kegagalan negara untuk mengatasi masalah kelaparan dilatarbelakangi oleh semakin banyak korban-korban skema pengentasan kemiskinan yang terlalu diinstitusionalisasi. Skema-skema institusionalis tersebut seringkali menggeneralisasi kebutuhan masyarakat lapar di negara satu dengan masyarakat lapar di negara lain. Ukuran lapar diidentikkan dengan kemiskinan dan ketidaktersediaan komoditas bahan pangan. Jika dalam masyarakat tertentu terjadi kondisi kelaparan akibat ketidakmampuan individu untuk membeli bahan pangan menurut standar kesehatannya, maka masyarakat tersebut belum tentu terhitung secara kuantitatif sebagai masyarakat miskin. Pogge melihat bahwa ketimpangan standar dan generalisir kapabilitas individu perlu diperbaiki. Secara lebih lanjut, ia kemudian memberikan rekomendasi penerapan *Global Resources Tax* (GRT). Ide utama dari GRT adalah untuk memberikan pajak bagi entitas yang berupaya untuk mengekstrak sendiri sumber dayanya (Pogge 1994). Pemerintahlah yang berkewajiban untuk membayar GRT dan mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan pajak tersebut guna meningkatkan kapabilitas administratif pada sektor-sektor yang dibutuhkan.

Melengkapi klaim Thomas Pogge berkaitan dengan lemahnya kritik teoris pembangunan klasik tentang fenomena kelaparan dan kemiskinan, Amartya Sen (1999) muncul dengan ide pembangunan berbasis HAM. Dalam penjelasan tentang pentingnya dimensi HAM dalam pembangunan, Amartya Sen berangkat dengan sejumlah kecurigaan terhadap teori-teori pembangunan klasik. Misalnya, kapankah keputusan mayoritas bebas dari ambiguitas dan konsisten? Bagaimana cara menilai taraf hidup masyarakat yang di dalamnya terdiri dari manusia-manusia dengan kepentingan yang berbeda-beda? Bagaimana caranya mengukur kemiskinan yang terdiri dari berbagai macam bentuk kesengsaraan dalam masyarakat? Bagaimana caranya mengakomodasi hak dan kebebasan seseorang sambil mempertimbangkan preferensi yang mereka miliki? Atau bagaimana caranya menilai dan menyikapi keamanan epidemiologi?

Berdasarkan sejumlah studi tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial, banyak lapisan masyarakat yang hanya memiliki kemampuan sebagai buruh kasar. Kapabilitasnya sebagai buruh kasar memengaruhi sulitnya mencari pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan upah dengan standar lebih tinggi, dan harga komoditas yang dapat

ia beli (Sen 1999). Masalah kelaparan dan kemiskinan global lebih mudah dianalisis melalui konsep “hak”¹ dibandingkan dengan menggunakan standar tradisional seperti hubungan antara populasi dan kesediaan bahan pangan. Kemiskinan biasanya diidentikkan dengan rendahnya pendapatan dengan jalan menghitung jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.² Kemiskinan seharusnya tidak selalu diukur menggunakan ukuran rendahnya pendapatan dan perhitungan jumlah masyarakat miskin. Diagnosis garis kemiskinan diklaim Amartya Sen bermasalah karena adanya sejumlah kemungkinan baru. Bagaimana jika ada seorang individu dengan pendapatan jauh di atas garis kemiskinan namun tidak berdaya membeli obat-obatan mahal yang ia butuhkan? Pengukuran kapabilitas setiap individu sebenarnya berbeda dan lebih penting daripada sekadar menghitung angka kemiskinan berdasarkan sistem *head counts* (menggunakan standar pendapatan). Diagnosis teoris pembangunan klasik terhadap kondisi lapar juga bermasalah menurut Amartya Sen. Kelaparan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu membeli suplai makanan yang cukup. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan standar konsumsi setiap individu. Di dalam pembangunan berbasis HAM perlu ada hak atau Sen menyebutnya dengan “entitlement”. Hak atau “entitlement” berarti adanya pengaruh individu terhadap kehidupan bermasyarakat tanpa disertai ketimpangan hak dan kapabilitas. Keluputan dari teoris pembangunan klasik untuk melihat faktor “entitlement” itulah yang membuat masalah kelaparan dan kemiskinan seakan sulit untuk diatasi karena fokusnya selalu pada *supply of goods*. Berdasarkan pendekatan analisis kelaparan tradisional yang dirumuskan oleh Adam Smith dan Malthus kelaparan diorientasikan pada kondisi kelangkaan bahan pangan. Adanya bencana kelaparan sebagai akibat dari ketimpangan hak ternyata terjadi di India dan Cina. Menariknya, keduanya juga tidak diakibatkan oleh masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesenjangan antara populasi dengan *supply of goods*. Di India masalah kelaparan diakibatkan oleh ketergantungan masyarakat India terhadap upah roti dari tuan tanah sedangkan di Cina diakibatkan oleh ketimpangan hak akses sumber daya di wilayah perkotaan dengan di pedesaan.

Model Penanganan Kemiskinan India

Bencana kelaparan di India pada tahun 1960-1980 membawa cerita yang menarik. Kelaparan di wilayah Rajasthan dan Bengal tidak

1 Amarta Sen menyebutkan konsep *entitlement* di dalam tesisnya

2 Garis kemiskinan yang memiliki ukuran tradisional seperti jumlah pendapatan dalam kurun waktu satu bulan misalnya

diakibatkan oleh kelangkaan atau naiknya harga pangan melainkan oleh kecenderungan pekerjaan masyarakat kasta bawah. Kultur bangsa India pada masa itu mengajarkan bahwa lebih baik lapar daripada harus menjual aset keluarga kepada tuan-tuan tanah (Swift 1993). Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat kasta bawah di India diawali dengan tertutupnya opsi jenis mata pencaharian. Pekerjaan sebagai pelayan tuan tanah pada umumnya dilakukan secara turun temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga kasta bawah di India memiliki kecenderungan pola pikir yang kurang dinamis. Jika dikaitkan dengan kritik Thomas Pogge dan Amartya Sen terhadap teori pembangunan klasik, diperoleh afirmasi bahwa adanya ketimpangan hak justru lebih potensial menciptakan kemiskinan yang berujung pada kelaparan dibandingkan dengan kondisi langkanya bahan pangan.

Masalah kemiskinan yang mengakibatkan adanya kelaparan di India tidak hanya disebabkan oleh kecenderungan pekerjaan masyarakat kasta bawah. Kemiskinan di India ternyata juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penjajahan Inggris. Pada tahun 1905 pasukan Inggris membuat partisi di wilayah Bengal untuk memisahkan wilayah pemukiman bagi penduduk Muslim dan penduduk Hindu. Konflik disparitas menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Selama masa konflik disparitas antara penduduk Muslim dan Hindu persediaan bahan pangan di India turut terancam. Kelangkaan bahan pangan sendiri memang terjadi di India pada tahun 1940 dan 1970. Seperti diklaim oleh Dyson (1991), kelangkaan bahan pangan di India terjadi akibat kegagalan panen sebagai dampak dari angin muson. Meskipun demikian di dalam penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Swift pada tahun 1993 ditemukan bahwa kelaparan di India tidak menjadi penyebab kematian utama. Penyakit kolera dan malaria merupakan pembunuh utama dan masalah yang paling darurat diselesaikan di India pada dekade 80an. Meskipun demikian, ditemukan penelitian lain yang menyatakan bahwa hadirnya penyakit kolera dan malaria di India merupakan data palsu yang disebarkan oleh penjajah Inggris. Seperti diklaim oleh Laxman D. Satya (1998) kemiskinan dan kelaparan di India disebabkan oleh tingginya pajak yang ditetapkan oleh penjajah Inggris terhadap petani-petani India.

"This meant that the grazing lands and common grounds virtually disappeared under the onslaught of colonial commercialization. The official term for designating such areas was "wastelands". For the British this meant lands that did not generate revenues, hence uneconomic and therefore the need to make it productive and economic by putting it under the plough. But for people in the villages, these lands were a part of their daily life and survival in

times of calamities such as famine and drought. Its disappearance had serious repercussions" (Satya 1998)

Kultur komersialisasi penjajah Inggris terhadap sektor-sektor pertanian di India pada masa penjajahan mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan masyarakat India. Fenomena ini bahkan tidak saja dialami oleh mereka yang berkasta rendah. Beberapa di antara kebijakan kolonial Inggris di India masih meninggalkan masalah hingga dekade 80an, salah satunya adalah masalah sanitasi air. Di wilayah Bengal sanitasi air dan irigasi bermasalah, hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit yang menyerang baik kulit maupun pencernaan. Kondisi ini berakibat pada tingginya permintaan masyarakat Bengal terhadap akses layanan kesehatan dan obat-obatan. Warisan kultur komersialisasi penjajah Inggris yang berdampak pada sejarah panjang kemiskinan dan kelaparan di India menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menciptakan solusi penanganan kemiskinan di India. Hal inilah yang seringkali luput disorot oleh para teoris pembangunan klasik perihal fenomena kelaparan dan kemiskinan.

Meskipun India mengalami sejarah panjang tentang akar penyebab kemiskinan dan kelaparannya, masih tersimpan cerita-cerita sukses di balik penanganan kemiskinan dan kelaparan. N.S. Jodha (1988) melihat bahwa kesuksesan bangsa India dalam mengatasi krisis pangan ditandai dengan tiga kecenderungan. Pertama, kaum dengan kasta rendah di India pada umumnya bekerja sebagai pelayan bagi tuan tanah atau kaum dengan kasta lebih tinggi. Akibat ketimpangan antara pekerjaan dengan upah yang memadai, masyarakat India memutuskan untuk tidak bergantung kepada tuan-tuan tanah. Pada tahun 1980 masyarakat India mengupayakan perubahan tren konsumsi, misalnya dari yang semula bergantung pada nasi yang diberikan tuan tanah, berganti menjadi mengonsumsi gandum dari produksi sendiri (Jodha 1988). Perubahan tren tersebut membuat rumah tangga miskin di India menjadi tidak bergantung pada pekerjaan-pekerjaan dengan upah sedikit karena telah terbebas dari kesulitan konsumsi. Kedua, keberhasilan pengentasan kelaparan di India pada tahun 1980 ditandai juga dengan hubungan timbal balik antara penguasa dengan gerakan "Famine Codes". Hubungan timbal balik tersebut diwujudkan dalam kebijakan peningkatan porsi lapangan pekerjaan bagi buruh kasar dengan hibah sereal dari gerakan. Ketiga, adanya Revolusi Hijau yang telah memastikan bahwa ketersediaan pangan per kapita tidak jatuh dan bahwa ada cadangan pangan domestik yang besar untuk keadaan darurat, perbaikan besar dalam infrastruktur dan komunikasi, khususnya jalan, kereta api, dan pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan

kerjasama yang baik dari pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil yang menjamin bahwa Revolusi Hijau berlangsung konsisten.

Model Penanganan Kemiskinan Cina

Selain India, Cina adalah salah satu negara lain yang membawa cerita menarik tentang kelaparan dan kemiskinan. Kelaparan di Cina pada tahun 1960an diawali dengan menurunnya komoditas cadangan makanan dan hak akses sumber bahan pangan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran bayi di Cina pada masa itu. Sekilas fenomena tersebut mengingatkan pada ramalan Malthus tentang hubungan antara populasi dan cadangan makanan. Ternyata kemiskinan dan kelaparan di Cina pada tahun 1960 belum dapat disimpulkan diakibatkan oleh ketimpangan antara populasi dan cadangan bahan pangan, melainkan dikarenakan ketimpangan kebijakan pemerintah. Rezim di Cina saat itu menempatkan cadangan makanan hanya di wilayah perkotaan di mana masyarakat kota memiliki hak lebih besar dibandingkan masyarakat desa untuk mengakses bahan makanan sesuai kebutuhan keluarga. Jumlah permintaan masyarakat perkotaan di Cina terhadap komoditas petani sangat lemah. Pemerintah kemudian menerapkan sejumlah kebijakan proteksi terhadap produksi komoditas non-pertanian. Pasca penerapan kebijakan proteksionisme, di saat musim gagal panen terjadi cadangan makanan di Cina menipis drastis. Selama masa "Great Leap Forward" tahun 1959-1961 sektor agrikultur Cina kolaps. Produksi biji-bijian turun 15% dan hanya memenuhi kebutuhan pangan sebesar 70% pada tahun 1960an. Hal ini mengakibatkan bencana kelaparan dengan angka kematian mencapai 23-30 juta jiwa (Peng dan Ashton et al. 1984).

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi bencana kelaparan di Cina adalah penerapan sistem *Unified Procurement and Unified Sale* untuk produksi biji-bijian dan minyak. Sistem ini ditujukan untuk mengawasi distribusi komoditas pertanian dan mengawasi harga yang beredar di pasaran. Sistem diberlakukan dengan cara mengekstraksi surplus agrikultur untuk memfasilitasi strategi pembangunan. Berdasarkan sistem *Unified Procurement and Unified Sale* pemerintah pusat dapat menetapkan target pembelian komoditas biji-bijian dalam skala nasional sebelum musim panen berlangsung. Targetnya adalah konsumsi masyarakat kota terencana, reservasi daerah perkotaan, dan kontrol perdagangan internasional. Setelah musim panen terjadi, badan pengawas komoditas pertanian mem-

berikan laporan jumlah produksi komoditas kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat kemudian bertugas untuk mendistribusikan komoditas pertanian tersebut di setiap provinsi disertai dengan harga yang telah disubsidi. Untuk mengawasi kebutuhan pangan wilayah perkotaan dan memastikan bahwa distribusi pangan jatuh di tangan yang tepat, pemerintah menerapkan sistem kupon (Walker 1984). Pemerintah secara lebih lanjut menerapkan sistem formal untuk memberikan bantuan pangan yang disesuaikan dengan usia, pekerjaan, dan beberapa karakteristik demografik lainnya. Hal ini efektif untuk menghindari adanya kesenjangan distribusi pangan antara wilayah kota dengan wilayah pedesaan.

Pada dasarnya kasus dan solusi yang terjadi di Cina berbanding terbalik dengan India. Pemerintah Cina memiliki andil yang besar dalam penanganan kemiskinan dan kelaparan. Jika diperhatikan keberhasilan pemerintah Cina dalam memobilisasi peran rakyat dalam distribusi bahan pangan merata terlepas dari upayanya untuk menginstitusionalisasi solusi secara berlebihan. Pemerintah Cina juga mampu membedakan kebutuhan konsumsi tidak saja dengan pemisahan karakteristik konsumsi per wilayah melainkan konsumsi per karakteristik demografis. Thomas Pogge (1994) pernah merekomendasikan penerapan *Global Resources Tax* yang berarti penetapan pajak bagi entitas yang berupaya untuk mengekstrak sendiri sumber dayanya. Menariknya, sebelum rekomendasi tersebut populer, pemerintah Cina pada dekade 1960 menerapkan *Unified Procurement and Unified Sale* dengan misi ekstraksi surplus agrikultur untuk pengawasan strategi pembangunan di negaranya. Meskipun cenderung bersifat *top down*, solusi yang diterapkan di Cina terbebas dari generalisasi penyebab kemiskinan dan kelaparan yang umumnya digunakan di negara-negara lain.

Solusi penanganan kemiskinan *top down* yang diterapkan di Cina berlangsung untuk jangka panjang. Hingga menuju tahun 1970-1980 akhir ekonomi Cina melambung tinggi. Pemerintah Cina membidik peningkatan kualitas hidup petani sebagai solusi lanjutan (Gosh 2010). Pemerintah menyadari bahwa sektor pertanian adalah ladang emas utama bagi masyarakat Cina. Pembangunan pada dekade 1970 dilaksanakan dengan berfokus kepada akar masalah yang diindikasikan menjadi penyebab bencana kelaparan di Cina pada awal tahun 1960. Seperti diklaim oleh Jayati Gosh (2010) petani-petani Cina diberikan kuasa penuh untuk menggunakan lahan dan mengawasi jenis komoditas yang akan dihasilkan. Pemerintah kemudian berupaya untuk menaikkan harga komoditas tersebut dan mensubsidi petani. Di bawah ini adalah pernyataan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Jayati Gosh.

"The first period 1979–1984 was when policies of economic reform focused on the countryside. Over these years, the "reorganisation" and dismantling of the rural people's communes led to the parcelling out of land to households on a broadly egalitarian basis, with peasant households being given control over the use of land without having the right to sell. Instead of the previous "grain first" policy, farmers were encouraged to diversify production to more high-value produce. At the same time, crop prices were raised 30 per cent over the five-year period. In addition, supplies of agricultural inputs, including chemical fertilizers, were sharply increased and provided to farmers at subsidised rates. All this led to significant increases in agricultural incomes, and this translated directly into reduced poverty because most cultivators were net sellers of both cash crops and food grains" (Gosh 2010)

Solusi penanganan kemiskinan yang bersifat *top down* tidak selamanya membutuhkan institusionalisasi yang berlebihan. Di dalam analisis akar masalah kemiskinan diperlukan adanya peran aktif pemerintah, terlebih jika akar masalahnya berhubungan dengan komoditas utama versus elastisitas harga. Akar masalah kemiskinan yang disusul dengan epidemi kelaparan di India disebabkan oleh ketimpangan antara jenis mata pencaharian per kasta dengan kultur konsumsi. Ketimpangan tersebut diperparah dengan masalah yang diwariskan kolonial Inggris berupa buruknya kondisi sanitasi dan irigasi (Satya 1998). Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek di dalam penanganan kemiskinan sehingga perubahan kultur lebih dibutuhkan. Keberhasilan tersebut tidak lepas pula dari peran gerakan massa yang menginspirasi pemerintah untuk turut memberikan solusi kelaparan bagi India. Berbanding terbalik dengan India, pemerintah Cina menjadi subyek utama dari penanganan kemiskinan. Akar masalah kemiskinan dan kelaparan di Cina diindikasikan terjadi akibat ketimpangan distribusi pangan di wilayah perkotaan dan pedesaan (Peng dan Ashton et al. 1984). Petani merupakan obyek sorot utama karena menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk desa. Solusi *top down* yang diterapkan oleh pemerintah Cina ternyata berdampak jangka panjang yang tidak saja mampu mengatasi masalah kemiskinan namun sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Apa yang dapat kita pelajari dari kasus India dan Cina? Pada

dasarnya kasus di India dan Cina berbeda penanganan, India lebih menerapkan solusi yang bersifat *bottom up* sementara Cina menerapkan solusi yang lebih bersifat *top down*. Benang merah dari kedua kasus tersebut adalah masalah kemiskinan dan kelaparan tidak dapat digeneralisasi dan diinstitusionalisasi berlebihan. Faktor sejarah seperti masalah yang ditimbulkan oleh kolonialisme penting untuk dipertimbangkan sebagai penyebab dari bencana kelaparan. Di samping itu, belum banyak negara yang mampu mengatasi secara mandiri masalah kemiskinan di negaranya yang mampu berdampak jangka panjang.

Bentuk kemiskinan menurut diagnosis Adam Smith dan Malthus tentang kondisi kelangkaan pangan tidak dapat digeneralisasi terjadi di seluruh dunia. Di dalam kultur tertentu, bencana kelaparan terjadi bukan karena populasi dan tingkat pendapatan yang rendah. Thomas Pogge mengajarkan bahwa hak akses sumber daya di dalam satu lapisan masyarakat seharusnya seimbang, tidak seperti kesenjangan hak yang terjadi dalam kasus India dan Cina. Baik Cina dan India sama-sama membuktikan tesis Thomas Pogge dan Amartya Sen berkenaan dengan perbedaan kapabilitas konsumsi dalam lapisan masyarakat. Solusi yang diterapkan India dan Cina ditujukan langsung pada akar masalah dalam masyarakat. Selama ini, diagnosis kemiskinan tradisional seperti yang terjadi di negara-negara lain diatasi dengan resep-resep neoliberalisme yang belum tentu merujuk langsung kepada akar masalah dari kemiskinan tersebut. Kedua kasus kelaparan di India dan Cina memberikan solusi alternatif dan analisis kontemporer yang bisa jadi bermanfaat bagi penanganan kemiskinan dan kelaparan di negara lain, termasuk di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- _____, 1983. "Which Way Now?", *Wiley: The Economic Journal*, **93** (372): 745-762.
- _____, 1999. "The Possibility of Social Choice", *JSTOR: The American Economic Review*, **89** (3): 349-378.
- _____, 1994. "An Egalitarian Law of Peoples", *Philosophy &*

- Public Affairs*, **23** (3): 195-224.
- Jodha, N.S., 1988. "Poverty Debate in India: A Minority View", *Economic and Political Weekly*, **23** (45): 2421-2428.
- Lin, Justin Yifu dan Dennis Tao Yang, 2000. "Food Availability, Entitlements And The Chinese Famine of 1959-1961", *The Economic Journal*, **110** (460): 136-158.
- Peng, Xizhe, 1987. "Demographic Consequences of the Great Leap Forward in China's Provinces", *Population and Development Review*, **13** (4): 639-70.
- Pogge, Thomas W., 1992. "Cosmopolitanism and Sovereignty", *Ethics*, **103** (1): 48-75.
- Ratna, Rajan Sudesh, 2010. *The Global Economic Crisis and Rising NTMs – is South-South Trade A Viable Solution*. Bangkok: ESCAP.
- Swift, Jeremy, 1993. "Understanding and Preventing Famine and Famine Mortality", *IDS Bulletin*, **24** (4).
- Dyson, T., 1991. "On the Demography of South Asian Famines", *Population Studies* **45**: 5-25; 279-97.

Buku

- Preston, Peter Wallace, 1996. *Development Theory An Introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Sen, Amartya, 1999. *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- _____, 1982. *Choice, Welfare And Measurement*. Oxford: Blackwell, and Cambridge. Mass.: MIT Press.
- Walker, Kenneth R, 1984. *Food Grain Procurement and Consumption In China*. New York: Cambridge University Press.

Laporan Penelitian

- Independent Evaluation Group, 2013. *The World Bank Group and the Global Food Crisis: An Evaluation of the World Bank Group Response*. Washington: World Bank Group.
- World Bank, 1999. *World Development Report 1998/99*. Oxford: Oxford University Press.

